**PROSES INTERVENSI PADA ANAK BERHADAPAN HUKUM DI SENTRA
HANDAYANI JAKARTA**

**Muhammad Kholis Hamdy¹,
Nunung Khairiyah² Muhammad
Alkuriz Aditya³, Mutia Nabila⁴,
Pramilania Oktavia⁵**

Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatulllah

*Corresponding author
Email: mkholis.hamdy@uinjkt.ac.id

No. doi: 10.24198/focus.v6i2.47847

ABSTRAK

Tujuan penelitian artikel ini untuk menganalisa dan memberi gambaran proses intervensi pada anak berhadapan dengan hukum (ABH) di Sentra Handayani Jakarta dalam menjalani rehabilitasi sosial. Urgensi dari penelitian ini terlihat dari lonjakan kasus pada ABH setiap tahunnya meningkat. Hal tersebut menjadi refleksi diri bagi tiap rehabilitasi sosial terkait apakah pelaksanaan proses intervensi pada ABH sebagai penerima manfaat sudah terlaksana secara optimal dalam memberikan kesadaran dan mengembalikan keberfungsian sosial anak sehingga anak tidak mengulangi tindakan melanggar hukum setelah pulang dari rehabilitasi sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif kualitatif yang pada saat pengumpulan datanya dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan studi pustaka. Pengumpulan data dilakukan di Sentra Handayani Jakarta selama 3 (tiga bulan) yakni Maret hingga Juni 2023. Wawancara dilakukan pada profesi-profesi yang terlibat dalam proses intervensi yakni 1 pekerja sosial, 2 psikolog, 1 guru bimbingan mental spiritual serta pengasuh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses intervensi, tiap profesi memiliki peran berbeda, seperti peran pekerja sosial memfokuskan pada intervensi penerima manfaat, administratif, dan keluarga; peran psikolog berkaitan dengan aspek psikologis penerima manfaat; dan peran guru bimbingan mental spiritual serta pengasuh memfokuskan pada perbaikan akhlak dan spiritual penerima manfaat. Kesimpulannya adalah saat proses intervensi berlangsung dibutuhkan kerja sama dari setiap pihak karena untuk menghasilkan intervensi yang optimal dibutuhkan peran-peran profesi yang berkaitan untuk saling mendukung proses intervensi yang dilaksanakan. Signikansi penelitian ini adalah memberikan gambaran mengenai proses intervensi tiap profesi memiliki peran, pendekatan, strategi, dan tantangan berbeda. Penelitian ini merekomendasikan agar tiap lembaga rehabilitasi sosial lebih memfokuskan pelaksanaan intervensi yang optimal

Kata-kata kunci: anak berhadapan hukum, proses intervensi, rehabilitasi sosial

ABSTRACT

The purpose of this article is to analyze and describe the intervention process for children in conflict with law (ABH) at Sentra Handayani Jakarta in undergoing social rehabilitation. The urgency of this research can be seen from the spike in cases of children in conflict with law every year. This has become a self-reflection for each social rehabilitation regarding whether the implementation of the intervention process for children in conflict

with law as beneficiaries has been carried out optimally in providing awareness and restoring children's social functioning so that children do not repeat unlawful acts after returning from social rehabilitation. This research uses a qualitative approach with a qualitative descriptive method which at the time of data collection is carried out by means of interviews, observations, and literature studies. Data collection was undertaken at Sentra Handayani Jakarta for 3 (three months), namely March to June 2023. Interviews were conducted with professionals involved in the intervention process, including 1 social worker, 2 psychologists, 1 mental spiritual guidance teacher and caregivers. The results showed that in the intervention process, each profession has a different role, such as the role of social workers focusing on beneficiary, administrative, and family interventions; the role of psychologists is related to the psychological aspects of beneficiaries; and the role of mental spiritual guidance teachers and caregivers focuses on improving the morals and spirituality of beneficiaries. The conclusion is that when the intervention process takes place, cooperation from each party is needed because to produce an optimal intervention, the roles of related professions are needed to support each other in the intervention process. The significance of this research is that it provides an overview of the intervention process, each profession has different roles, approaches, strategies and challenges. This research recommends that each social rehabilitation center focuses more on implementing optimal interventions.

Keywords: children in conflict with law, intervention process, social rehabilitation

PENDAHULUAN

Dalam beberapa kasus, seorang anak dapat menjadi seorang pelaku dalam tindak kejahatan. Di era globalisasi yang serba digital memudahkan anak dalam mengakses berbagai informasi dapat menjadi dua mata pisau bagi seorang anak. Pasalnya, ketika seorang anak mampu memanfaatkan informasi yang didapat untuk hal baik tentunya menghasilkan dampak yang positif, akan tetapi ketika seorang anak mengakses informasi dan memotivasi anak tersebut melakukan tindak kejahatan maka hasil yang didapat ialah berupa dampak negatif.

Anak merupakan hasil dari hubungan perkawinan orang tua yang menjadi harapan bagi setiap keluarga untuk tumbuh menjadi seseorang yang bermanfaat bagi keluarga, masyarakat,

bangsa, dan negara. Dalam pengertian secara hukum menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2014, anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) anak dapat diartikan sebagai seorang yang belum dewasa, sebagai orang yang mempunyai hak-hak khusus dan perlu mendapatkan perlindungan menurut hukum yang berlaku (Pribadi, 2018).

Anak pada dasarnya memiliki hakikat sebagai insan yang suci, akan tetapi dalam fakta lapangannya beberapa anak justru terlibat dalam kasus pelanggaran hukum yang disebabkan oleh beberapa faktor yakni internal seperti motivasi diri, lingkungan keluarga, dan intelegensia. Sedangkan, faktor eksternal karena

pengaruh lingkungan pergaulan, pendidikan, dan media massa (Prasetyo, 2020). Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak-anak biasanya terbentuk dari kenakalan remaja yang berakibat merugikan diri sendiri bahkan orang lain secara fatal sehingga aksi kenakalan remaja tersebut mampu dipidana. Bentuk-bentuk kenakalan remaja tersebut seperti: tawuran, kekerasan seksual, pengeroyokan, perdagangan orang, minuman keras, narkoba, dan berbagai kenakalan remaja lainnya. Menurut Willis (2010) faktor-faktor yang menyebabkan kenakalan remaja antara lain: faktor diri sendiri, faktor keluarga, faktor dari lingkungan masyarakat, dan faktor dari lingkungan sekolah (Meitasari & Kurniawan, 2021). Anak-anak yang memiliki keterlibatan dalam pelanggaran hukum dapat dikatakan sebagai Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH).

Berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, yang dimaksud anak berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan saksi tindak pidana. Menurut Data Indonesia, pada tahun 2022 Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) telah mencatat 1.903 kasus terkait perlindungan khusus terhadap anak. Adapun kasus-kasus anak tersebut meliputi: 746 kasus anak menjadi korban kejahatan seksual, 454 kasus anak menjadi korban kekerasan fisik dan/atau psikis, 187 kasus anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku, 80 kasus anak korban eksploitasi ekonomi dan/atau seksual, serta 70 kasus anak korban pornografi dan *cybercrime* (Rizaty, 2022). Dilansir dalam Databoks, Komisi Perlindungan Anak Indonesia mencatat dari tahun 2016 hingga 2020 bahwa terdapat 655 anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku kekerasan, kekerasan tersebut meliputi 506 anak melakukan kekerasan fisik dan 149 anak melakukan kekerasan psikis. Dalam

beberapa periode terakhir, kasus anak berhadapan dengan hukum selalu berada di atas 100 kasus/tahunnya (Pahlevi, 2022). Berdasarkan lonjakan data tersebut dapat dilihat bahwa kasus terkait anak berhadapan dengan hukum harus dikaji lebih lanjut untuk mengidentifikasi lebih dalam terkait latar belakang peningkatan jumlah kasus setiap tahunnya. Latar belakang yang dimaksud adalah apakah kasus-kasus tersebut dominan terjadi dengan pelaku-pelaku baru atau kasus-kasus tersebut dominan terjadi dengan pelaku-pelaku lama yang sebelumnya sudah pernah ditindaklanjuti secara hukum namun pelaku tersebut belum menemukan titik jera sehingga mengulangi aksinya.

Anak-anak berhadapan hukum tersebut mendapat perlindungan sesuai mandat Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), salah satunya adalah dengan memberikan rehabilitasi sosial kepada ABH. Rehabilitasi sosial yang diberikan pada anak yang melakukan pelanggaran hukum didasari oleh pendekatan keadilan restoratif. Yang dimaksud dengan keadilan restoratif menurut UU SPPA Pasal 1 ayat 1, keadilan restoratif merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Hal ini berkaitan dengan proses diversifikasi yakni proses peralihan dalam menyelesaikan perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses luar pidana. Latar belakang kebijakan tersebut adalah melihat bahwa sanksi pidana dapat berdampak kurang baik bagi tumbuh kembang ABH terutama pada aspek psikologis, stigma negatif, dan hak-hak anak lainnya. Oleh karena itu, anak yang melakukan pelanggaran hukum akan dilakukan peninjauan kualifikasi keadilan

restoratif, ABH yang memenuhi kualifikasi tersebut maka akan ditindaklanjuti dengan proses rehabilitasi sosial.

Menurut Undang-Undang No.14 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial menyebutkan bahwa rehabilitasi sosial merupakan proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Jadi dengan kata lain, rehabilitasi sosial merupakan proses untuk mengembalikan keberfungsian sosial klien dengan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh klien dengan mengindahkan norma dan aturan yang berlaku di masyarakat sehingga klien tersebut dapat diterima oleh masyarakat. Program rehabilitasi sosial ABH dilakukan oleh beberapa instansi dan saling berkaitan satu sama lain, seperti: penegak hukum, pemerintah yang bersangkutan, dan lembaga sosial kemasyarakatan (Meitasari & Kurniawan, 2021).

Sentra Handayani Jakarta merupakan salah satu pelaksana teknis (UPT) Kementerian Sosial, tugas pokok dan fungsinya mengenai penyelenggaraan pelayanan preventif, kuratif, rehabilitatif, dan rehabilitasi sosial berupa pembinaan fisik, psikis, sosial dan keterampilan, serta resosialisasi dan bimbingan lanjutan bagi anak berhadapan hukum untuk dapat mandiri dan berperan aktif dalam masyarakat. Pada tahun 2022 Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Handayani Jakarta Timur mengalami perubahan nama menjadi Sentra Handayani Jakarta. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial RI: No. 17/HUK/2018 menyatakan bahwa pergantian nama BRSAMPK Handayani Jakarta Timur menjadi Sentra Handayani Jakarta dan kedelapan UPT anak yang digolongkan berdasarkan jenisnya dilakukan dalam rangka guna tercapainya Indonesia bebas ABH dari lapas dewasa

2018 (Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018).

Dalam Sentra Handayani di Jakarta sebagai Lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial bagi ABH maka dijalankannya peran-peran yang menunjang proses rehabilitasi sosial, seperti peran psikologi, peran pekerja sosial, dan peran bimbingan mental. Dalam proses menjalankan peran-perannya, profesi tersebut ikut terlibat dalam intervensi. Intervensi menurut Adi (2008), dikatakan sebagai proses perubahan yang telah direncanakan oleh *change of agent* atau pelaku perubahan terhadap *target of change* yang meliputi individu, keluarga, dan kelompok kecil untuk level mikro, sedangkan level mezzo meliputi komunitas dan organisasi, serta level makro untuk masyarakat yang lebih luas (Rivaldi et al., 2020). Dalam proses intervensi bagi ABH tentunya memiliki berbagai rancangan karena latar belakang kasus yang dialami oleh ABH sangatlah bervariasi. Para profesi yang memiliki peran dalam menunjang proses rehabilitasi sosial memiliki tanggung jawab penuh terhadap proses intervensi yang dijalankan oleh ABH mulai dari perencanaan, pengimplementasian, dan evaluasi. Dalam intervensi tersebut tentunya memiliki berbagai pendekatan, tahapan, dan kendala yang dialami oleh para psikolog, pekerja sosial, dan bimbingan mental spiritual selama mereka membantu proses rehabilitasi sosial di Sentra Handayani di Jakarta. Oleh karena itu, berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah dijelaskan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait proses intervensi pada anak berhadapan hukum di Sentra Handayani di Jakarta. Adapun tujuan penelitian artikel ini untuk menganalisa dan memberi gambaran proses intervensi pada anak berhadapan dengan hukum (ABH) di Sentra Handayani Jakarta dalam menjalani rehabilitasi sosial. Urgensi dari penelitian ini terlihat dari lonjakan kasus pada ABH

setiap tahunnya meningkat. Hal tersebut menjadi refleksi diri bagi tiap lembaga rehabilitasi sosial terkait apakah pelaksanaan proses intervensi pada ABH sebagai penerima manfaat sudah terlaksana secara optimal dalam memberikan kesadaran dan mengembalikan keberfungsian sosial anak sehingga anak tidak mengulangi tindakan melanggar hukum setelah pulang dari rehabilitasi sosial.

METODE PENELITIAN

Dalam menganalisis proses intervensi pada anak berhadapan hukum (ABH) di Sentra Handayani Jakarta, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Sukmadinata (2005), dasar penelitian kualitatif adalah konstruktivisme yang beranggapan bahwa suatu kenyataan itu berdimensi jamak, interaktif dalam pertukaran pengalaman sosial yang dimaknai oleh tiap individu. Menurut Danin (2002), penelitian kualitatif mempercayai bahwa kebenaran itu adalah dinamis dan dapat ditemukan hanya melalui penelaah terhadap orang-orang melalui interaksinya dengan situasi sosial mereka. Jadi penelitian kualitatif mengkaji perspektif partisipan dengan strategi yang fleksibel dan interaktif yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial yang terjadi berdasarkan perspektif partisipan. Dalam hal ini, proses intervensi pada anak berhadapan hukum (ABH) yang berlangsung di Sentra Handayani Jakarta melibatkan beberapa profesi dalam proses pelaksanaan intervensi. Dengan demikian, setiap profesi tersebut memiliki perspektif dan pengalaman sosial yang berbeda dalam pelaksanaan proses intervensi terhadap anak berhadapan hukum (ABH) di Sentra Handayani Jakarta. Oleh karena itu, peneliti ingin mengkaji lebih lanjut terkait menemukan karakteristik dari setiap proses intervensi yang dijalankan oleh masing-masing profesi yang terlibat. Hal ini sejalan dengan tujuan pendekatan penelitian kualitatif yakni untuk

menemukan suatu ciri khas atau karakteristik dalam suatu fenomena.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Menurut Sukardi (2008), deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya. Penelitian deskriptif juga pada umumnya dilakukan dengan tujuan utama yakni menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tepat. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha untuk menggambarkan dan menginterpretasikan proses intervensi pada ABH di Sentra Handayani Jakarta dengan melakukan pengumpulan data-data yang dibutuhkan, yakni data primer maupun data sekunder. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari pihak yang bersangkutan, sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui perantara seperti dokumen, media, atau orang lain.

Teknik pengumpulan data primer yang digunakan adalah wawancara dan observasi. Menurut Koentjaraningrat (1996), wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yakni pewawancara (*interviewer*) sebagai orang yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) sebagai orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan 1 (satu) pekerja sosial yakni Bapak Fajar Putra Nur Rahman, 2 (dua) psikolog yakni Ibu Euis dan Ibu Ima, dan 1 (satu) guru bimbingan mental spiritual serta pengasuh yakni Bapak Jubaedi. Keempat orang tersebut memiliki kualifikasi yang sesuai yakni berperan aktif dalam pelaksanaan proses intervensi di Sentra Handayani Jakarta sehingga dengan mewawancarai empat orang tersebut, peneliti bertujuan untuk mendapatkan informasi terkait proses intervensi yang dilakukan di Sentra Handayani Jakarta berdasarkan fakta,

perspektif, dan pengalaman yang dirasakan.

Selain wawancara, peneliti juga melakukan teknik pengumpulan data yakni observasi. Menurut Usman dan Purnomo (2004), observasi merupakan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Peneliti terlibat langsung ke lapangan untuk melakukan observasi kegiatan dan fenomena yang terjadi di Sentra Handayani Jakarta selama 3 (tiga bulan) yakni Maret-Juni 2023. Data-data yang diambil oleh peneliti juga diperkuat dengan mencari data-data sekunder untuk memenuhi kajian teori melalui studi pustaka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Krori (2012) Masa remaja merupakan suatu periode penting dari rentang kehidupan, suatu periode transisional, masa perubahan, masa usia bermasalah, masa dimana individu mencari identitas diri, usia menyeramkan (*dreaded*), masa *unrealism*, dan ambang menuju kedewasaan. (Krori, 2011). Oleh karena itu, para ABH diberikan kesempatan untuk mengembalikan keberfungsian sosialnya melalui rehabilitasi sosial. Proses rehabilitasi sosial diawali dengan *assessment*, *engagement*, *intervention*, hingga tahap evaluasi dan terminasi. Namun, dalam proses pengembalian keberfungsian sosial terfokus pada tahap intervensi. Para ABH yang melakukan pelanggaran hukum sebagai pelaku, rata-rata mendapatkan intervensi yang berkaitan dengan perubahan perilaku.

Secara umum, perilaku adalah segala sesuatu yang dikatakan atau dilakukan seseorang. Sebagian menyebutkan sebagai respon, reaksi, aktivitas. Karakteristik perilaku diukur dari 3 dimensi, yakni durasi, penilaian dan intensitas. Permasalahan pada perilaku diantaranya, *autism spectrum disorder*, *attention deficit/hyperactive disorder*, *anxiety*, *depression*, *low self-esteem*, *road rage*,

interpersonal difficulties, *sexual disfunction*. (Gray Martin dan Joseph Pear, 2019). Pada masa remaja, anak rentan melakukan permasalahan sosial yang tentunya memerlukan arahan tentang cara menghadapi suatu masalah atau kejadian atau dalam melakukan aktivitas.

Pendekatan *behavioral* digunakan untuk memperlakukan permasalahan tertentu pada diri penerima manfaat agar dapat diminimalisir atau dihilangkan sepenuhnya. Beberapa penanganan perilaku diterapkan oleh pemerintah atau institusi, salah satunya Sentra Handayani di Jakarta. Sentra Handayani menempatkan lingkungan kondusif berbasis ATENSI untuk melakukan rehabilitasi pada perilaku anak berhadapan hukum. Di lembaga ini anak ditempatkan pada lingkungan yang dirancang khusus untuk perbaikan diri. Rancangan tersebut termasuk menyediakan asrama, kegiatan bimbingan, sekolah, beserta petugas. Profesi yang berperan diantaranya pekerja sosial, psikolog, dan guru bimbingan mental spiritual dan pengasuh.

Adapun peran-peran profesi tersebut dalam intervensi meliputi: peran pekerja sosial dalam aspek administrasi, keluarga, dan diri penerima manfaat. Psikolog berperan dalam aspek psikologis. Guru bimbingan mental spiritual dan pengasuh berperan pada aspek akhlak dan spiritual.

Peran Pekerja Sosial

Menurut Bapak Fajar Putra Nur Rachman selaku pekerja sosial di Sentra Handayani Jakarta, anak berhadapan hukum merupakan anak yang dirujuk dari penyidik atau kejaksaan ataupun penetapan pengadilan. Pelaksanaan intervensi mikro pekerja sosial dilakukan berdasarkan catatan putusan pengadilan. Beberapa contoh catatan putusan hakim berupa: 1) pengembangan keterampilan vokasional anak, 2) Pemberian terapi psikososial, 3) Pemberian trauma healing bagi korban. Peran pekerja sosial pada saat

intervensi mencakup aspek administrasi, keluarga, dan diri penerima manfaat.

Dalam bidang administrasi, Pekerja sosial berperan sesuai dengan asal rujukan anak. Tahapan anak berhadapan hukum: 1) Penyidikan, 2) P2TP / Penuntutan / Kejaksanaan, 3) Tahapan pengadilan anak. Peran pekerja sosial dalam proses intervensi tahap administrasi salah satunya mengenai diversifikasi. Diversifikasi dalam SPPA merupakan penyelesaian hukum diluar pengadilan. Diversifikasi dilakukan di setiap tahapan. Pada tahapan penyidikan, pekerja sosial mempertemukan pihak korban dengan pelaku untuk mencari kesepakatan. Hak diversifikasi akan diterima kalau ada 3 komponen: 1) Bapas, 2) Peksos, 3) Penyidik. Dalam diversifikasi pekerja sosial melakukan negosiasi untuk memberikan hak yang semestinya didapatkan anak dan tanpa ada intimidasi pihak lain. Bagi anak tahap penyidikan hingga kejaksanaan, bersifat titipan. Sedangkan anak yang masuk berdasarkan penetapan hakim bersifat putusan. Peran pekerja sosial pada anak yang bersifat titipan adalah memastikan proses hukum yang dijalani anak tanpa ada intimidasi dari pihak-pihak lain. Pekerja sosial melakukan koordinasi dengan Bapas, penyidik, dan keluarga. Dalam undang-undang perlindungan anak, anak dapat dititipkan selama 7 - 8 hari. Apabila masa titipan telah melebihi waktu yang telah ditetapkan, pihak Sentra Handayani Jakarta berhak mengembalikan anak tersebut. Pada realitasnya, untuk memproses 1 kasus anak, penyidik memerlukan waktu hingga 2 bulan. Maka peran pekerja sosial mempercepat proses penyidikan ini dan memastikan proses hukum yang dijalani sesuai hukum yang ditetapkan. Pekerja sosial juga ikut mempertimbangkan tempat yang tepat sesuai dengan anak melalui laporan sosial.

Intervensi yang dilakukan pekerja sosial selain administratif adalah menjembatani keluarga. Intervensi keluarga merupakan instrumen penting dalam menyokong keberjalanan proses

hukum atau proses rehabilitasi pada anak putusan. Dari sudut pandang keluarga, pekerja sosial perlu mengetahui pandangan orangtua terhadap anak. Posisi dan gambaran anak dimata keluarga menentukan intervensi yang akan diberikan. Apabila keluarga tidak memberikan fungsinya sebagai penjamin, pelindung, pendidik, penolong, maka Pekerja sosial menyadarkan keluarga tentang peran keluarga bagi anak titipan. Salah satu peran penting keluarga adalah mempercepat proses hukum. Pekerja sosial berperan mendorong orang tua untuk membela anak.

Selanjutnya, pekerja sosial melakukan intervensi kepada anak dengan melakukan bimbingan psikososial. Dalam melakukan bimbingan psikososial perlu bagi pekerja sosial dalam menstimulasi anak untuk berpikir. Pekerja sosial juga melakukan terapi realitas, mengubah perilaku, mengubah cara berpikir. Hal yang perlu diperhatikan pekerja sosial dalam melakukan psikososial adalah bagaimana pandangan anak terhadap masalah dan pemaknaan anak terhadap masalah. Intervensi pada anak disesuaikan dengan kasus anak yang tentunya dirancang sejak anak pada tahap *assessment* sebagaimana peran pekerja sosial sebagai generalis praktis. Jika pekerja sosial dihadapkan pada 2 karakter anak: Pertama, anak yang datang dengan menganggap masalah yang sedang dihadapi tidak berarti. Kedua, anak datang dengan penuh perasaan bersalah dan menyesal. Nantinya intervensi yang dilakukan untuk masing-masing karakter akan disesuaikan. Pada anak yang datang tanpa merasa bersalah, pekerja sosial mengembalikan kesadaran kepada anak. Sedangkan bagi anak yang datang dengan rasa penyesalan pekerja sosial akan melakukan konseling. Pada saat anak telah mendapat keputusan penurunan asrama dan telah melalui proses intervensi, anak berada pada kondisi yang stabil. Sedangkan anak pada Rumah Antara bersifat tidak stabil, maka peran pekerja

sosial adalah menjaga keseimbangan kondisi anak, baik yang di asrama maupun Antara.

Setelah ditinjau berdasarkan hasil *assessment* dan mengetahui karakter anak, para pekerja sosial sebelum melakukan intervensi akan membuat rancangan terlebih dahulu, lalu melakukan diskusi dengan petugas dan profesi lain di Sentra Handayani Jakarta melalui *case conference* agar proses intervensi berjalan baik. Dalam menangani intervensi ABH, pekerja sosial mengambil sikap tegas dan tidak dapat dipandang lemah oleh anak berhadapan hukum khususnya pelaku. Sebaliknya, pada anak yang emosional, perlu dilakukan pendekatan yang dapat diterima dan membangun anak. Pekerja sosial dalam mengintervensi anak tidak dapat bekerja sendiri, pekerja sosial harus paham atas kondisi yang dihadapi untuk meminta bantuan dengan pihak lintas lembaga terkait. Setelah menjalani masa rehabilitasi, anak akan dikembalikan kepada keluarga. Maka pekerja sosial perlu mendirikan situasi kondusif dan bersikap kooperatif dengan pekerja sosial. Pada kasus tertentu, pekerja sosial mungkin memberikan bantuan kepada anak dalam rangka pendidikan. Anak titipan yang berstatus pelajar, pekerja sosial membantu anak tetap mendapatkan hak menempuh pendidikan.

Tantangan yang dihadapi oleh pekerja sosial dalam melakukan intervensi anak, salah satunya adalah terhambatnya proses hukum yang dijalani anak. Apabila proses hukum yang dijalani mencapai titik buntu, pekerja sosial meminta bantuan kepada pekerja sosial Madya untuk membantu memproses berjalannya hukum.

Peran Psikolog

Peran psikolog selama intervensi meliputi aspek psikologi penerima manfaat. Masalah kesehatan mental ABH bermacam-macam, seperti: trauma, emosi dan perilaku yang tidak baik. Cara mengatasi yang dilakukan psikolog

tergantung dari masalahnya dan karakter anak tersebut. Seperti penerima manfaat yang memiliki, maka psikolog harus menentukan *treatment* yang tepat karena penyembuhan trauma pelaku dan korban pun memiliki cara yang berbeda. Untuk mengatasi masalah kesehatan mental atau trauma ABH membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa menyembuhkan kesehatan mental. Psikolog dalam proses intervensi anak berhadapan hukum berperan untuk melakukan *assessment* dan memberikan penanganan terhadap masalah kesehatan mental. *Assessment* dilakukan untuk mengetahui kepribadian, potensi, dan mencari hal yang perlu diintervensi. Dalam hal ini, psikolog juga harus melakukan pendekatan kepada penerima manfaat. Pada ABH, rata-rata isu yang dihadapi adalah agresifitas. Agresifitas pada ABH berada pada *range* yang tinggi. Selain itu, isu yang sering ditemukan pada ABH adalah konsep diri.

Sentra Handayani di Jakarta menangani anak berhadapan hukum melalui setting ATENSI. Asistensi Rehabilitasi Sosial adalah layanan Rehabilitasi Sosial yang menggunakan pendekatan berbasis keluarga, komunitas dan/atau residensial melalui kegiatan dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak, perawatan sosial dan/atauan anak, dukungan keluarga, terapi fisik, terapi psikososial, terapi mental spiritual, pelatihan vokasional, pembinaan kewirausahaan, bantuan sosial dan asistensi sosial serta dukungan aksesibilitas. Setiap anak yang diterima oleh Sentra Handayani kemudian telah mendapatkan putusan akan ditangani oleh psikolog. Proses penanganan ini melalui beberapa tahap, yakni tahap pre-test, tahapan intervensi, dan post-test. Instrumen pada tahap pre-test dan post-test nantinya digunakan sebagai tolok ukur ada atau tidaknya perubahan pada tahap intervensi. Bentuk intervensi yang diberikan sesuai dengan hasil *assesment* dan sesuai dengan latar belakang, kondisi, serta kebutuhan anak. Pada anak yang

memiliki intelegensi dibawah rata-rata tidak diberikan CBT. Pada anak yang memiliki penyimpangan pemikiran diberikan CBT.

Dalam proses intervensi terdapat tiga jenis yakni melibatkan anak secara langsung dalam pengambilan keputusan, tidak melibatkan anak dalam pengambilan keputusan, dan melibatkan anak tetapi tidak sepenuhnya. Ketika anak dilibatkan langsung dalam pengambilan intervensi tujuannya adalah agar anak dapat mengerti dan mempermudah dalam proses menjalankan intervensinya, perlu menjadi catatan hal ini harus ditinjau dari karakteristik anak dan hasil *assessment*. Jika sekiranya anak itu memang mengerti dan pemikirannya cukup menerima dalam intervensi yang akan diberikan, psikolog dapat melibatkan anak itu. Selain itu ada anak yang dalam pengambilan keputusan intervensi tidak dilibatkan karena ditakutkan anak akan berpikir yang tidak baik terkait intervensinya sehingga menolak menjalankan intervensinya. Selanjutnya ada anak yang dilibatkan dalam pengambilan keputusan intervensi tetapi tidak sepenuhnya dilibatkan, jadi hanya dilibatkan beberapa intervensi saja agar anak tidak kaget dan tetap mau menerima intervensi itu sendiri. Untuk keterlibatan pengambilan keputusan intervensi untuk korban dan pelaku dibedakan. Untuk korban dikasih terlebih dahulu diawal terkait intervensi yang akan diberikan, sedangkan pelaku dikasih taunya atau dilibatkannya di akhir.

Menangani anak berhadapan hukum perlu strategi khusus, mengingat 'spesial'nya karakter dan cara pandang anak dalam melakukan tindakan. Dari segi pola pikir, anak berhadapan hukum memiliki cara pandangnya tersendiri, dari segi karakter, sebagian besar mereka terbangun dari lingkungan yang keras. Untuk dapat melakukan intervensi, psikolog perlu membangun kepercayaan. Apabila kepercayaan sudah terbangun, anak bisa memberikan informasi kepada

psikolog. Selain membangun kepercayaan, memperbanyak intensitas dalam bertemu dan berinteraksi dengan penerima manfaat. Hal ini juga menjadi strategi psikolog di Sentra Handayani di Jakarta menangani penerima manfaat anak berhadapan hukum.

90% anak ABH memiliki intelegensi di bawah rata-rata. Mereka tidak mampu memahami pertanyaan. Seperti misalnya dijelaskan permasalahan edukasi seks dan norma-norma ada kemungkinan besar tidak mampu dipahami. Secara teknis, mereka sudah mengetahui resiko perbuatan yang dilakukan, maka dari itu perlu dilakukan edukasi yang dapat dipahami anak sesuai kemampuan berpikirnya.

Dalam menangani anak, psikolog memerlukan peran keluarga. Keluarga merupakan tempat anak berasal, berdinamika, dan dikembalikan setelah tahap reintegrasi. Bagi anak yang memiliki keluarga yang suportif, keberadaan keluarga berperan besar membantu anak dalam proses rehabilitasi. Namun, peran keluarga lebih banyak dilakukan oleh pekerja sosial, sehingga psikolog menjalin kerjasama dengan pekerja sosial. Psikolog dapat memberikan teknik parenting kepada orang tua pada saat penjangkuan. Jika tidak secara langsung, maka psikolog dapat memberikan catatan rekomendasi kepada pekerja sosial.

Menurut Ibu Euis selaku Psikolog Sentra Handayani Jakarta, kendala psikolog dalam menangani penerima manfaat ialah para ABH telah terbentuk selama beberapa waktu di lingkungan luarnya hingga dapat melakukan perbuatan melanggar hukum, sehingga proses intervensi yang dilakukan selama 6 bulan belum mampu mengalahkan panjangnya proses pembentukan diri sebelumnya. Kedua intelegensi dibawah rata-rata membuat psikolog, mencari cara agar proses intervensi dapat diinternalisasi oleh PM. Ketiga, sistem on-off membuat proses intervensi terpotong di tengah jalan.

Keempat, jumlah PM yang banyak membuat psikolog tidak memiliki waktu yang optimal dengan PM yang ditangani.

Sedangkan menurut Bu Ima selaku psikolog Sentra Handayani Jakarta tantangannya adalah menghadapi anak-anak yang agresif. Selain itu juga kesulitan menghadapi anak-anak yang menutup diri ketika sedang kecewa, kesal, dan lain-lain. Jadi para penerima manfaat terdapat anak yang agresif, ekspresif, dan pasif. Cara mengatasinya lebih ke diri sendiri, sebagai psikolog harus dapat mengatur apa yang harus dilakukan agar terus mampu berinteraksi dengan klien.

Solusi untuk permasalahan psikolog tidak memiliki waktu yang optimal karena terlalu banyak penerima manfaat yang menjadi tanggung jawabnya, hal tersebut dapat diatasi dengan menangani terlebih dahulu klien yang sangat membutuhkan psikolog. Untuk anak yang belum memerlukan intervensi secara intens akan diberikan catatan rekomendasi kepada pekerja sosial.

Untuk meningkatkan efektivitas intervensi pada ABH harus saling bersinergi satu sama lain. Tidak hanya psikolog saja tetapi juga pengasuh, pekerja sosial, guru agama, dan lain-lain. Perubahan perilaku bisa dilakukan jika melakukan sesuatu yang berulang atau berkali-kali. Maka dari itu diperlukan peningkatan untuk memberikan perhatian dan afeksi agar efektivitas intervensi itu bisa berjalan dengan baik. Selain itu psikolog, pekerja sosial, pengasuh, dan orang-orang yang dekat dengan anak harus menyamakan tujuan persepsi agar efektivitas intervensi dapat meningkat. Dalam menangani penerima manfaat, psikolog tidak terlalu terlibat dalam penanganan klien kepada pihak luar. Psikolog melakukan kerja sama dengan anak dan pekerja sosial serta untuk memberikan rujukan kepada psikater jika diperlukan.

Peran Guru Bimbingan Mental Spiritual dan Pengasuh ABH

Dalam proses intervensi terhadap ABH di Sentra Handayani Jakarta juga melibatkan peran guru agama dan bimbingan mental spiritual karena aspek sosial saja tidaklah cukup untuk memperbaiki kualitas hidup para penerima manfaat, oleh karena itu perlunya bimbingan mental spiritual sebagai pondasi bagi para penerima manfaat. Menurut Bapak Jubaedi selaku guru agama dan bimbingan mental spiritual sekaligus pengasuh di Sentra Handayani Jakarta, Bimbingan mental dari segi agama merupakan suatu hal yang pokok dalam pemberian intervensi terhadap ABH. Bimbingan mental dan spiritual ABH mencakup beberapa aspek, seperti akhlak, psikologi, adab, dan lain-lain. Bimbingan mental agama ini penting karena pondasi agama bisa mempengaruhi perilaku anak. Berdasarkan pengalaman Bapak Jubaedi, kasus-kasus yang ditemui selama ini adalah para ABH tersebut rata-rata memiliki ilmu agama dan intensitas dalam beribadah kurang. Bimbingan mental yang utama ialah perbaikan akhlak dengan mengisi ketidaktahuan anak dalam hal ilmu agama.

Menurut Bapak Jubaedi, peran bimbingan mental spiritual adalah dapat memberikan para ABH dukungan spiritual dan moral. Hal tersebut termasuk membantu para ABH menemukan makna dan tujuan hidup, menguatkan nilai-nilai etika dan moral para ABH dalam diri mereka, dan membantu para ABH memahami implikasi spiritual dari tindakan mereka. Dukungan ini dapat membantu para ABH mengatasi perasaan bersalah, menumbuhkan rasa harapan, dan membangun kembali kepercayaan pada diri mereka.

Menurut Bapak Jubaedi, Peran bimbingan mental dan spiritual selanjutnya adalah mengenai pengolahan trauma. Anak-anak yang mengalami pengalaman traumatis akibat berhadapan dengan hukum memerlukan bantuan

dalam mengatasi dan memproses trauma tersebut. Bimbingan mental spiritual dapat membantu para ABH melalui penyediaan kerangka spiritual yang memberikan makna pada pengalaman mereka, membantu mereka mengenali dan mengelola emosi yang kuat, serta mendukung proses pemulihan mereka melalui doa, meditasi, atau praktik spiritual lainnya.

Peran bimbingan mental dan spiritual berikutnya adalah mengembangkan ketahanan mental. Bimbingan mental spiritual dapat membantu para ABH membangun ketahanan mental yang kuat. Ini mencakup membantu para ABH mengembangkan keterampilan seperti pemecahan masalah, pengaturan emosi, dan penyesuaian diri yang adaptif. Melalui pendekatan yang berpusat pada agama atau spiritualitas, bimbingan ini dapat memberikan mereka kerangka kerja dan strategi yang relevan dengan keyakinan mereka untuk menghadapi stres dan tantangan dengan lebih baik.

Strategi atau pendekatan yang digunakan oleh Bapak Jubaedi selaku guru agama dan bimbingan mental spiritual Sentra Handayani Jakarta untuk mendekati para ABH ialah harus berproses bersama dengan para penerima manfaat yaitu ABH dengan sering melakukan proses interaksi. Selain itu juga harus menyampaikan ilmu agama dan memberikan rujukan ke para penerima manfaat yakni ABH. Dalam menyampaikan ilmu juga harus memberikan contoh agar para ABH dapat mengerti dan ilmu agama yang disampaikan dapat diterima. Selain itu berikan ilmu yang dapat menyentuh hati mereka agar para ABH tersebut dapat berpikir dan sadar. Jika ada penerima manfaat yang bertanya, pada saat menjawab tidak hanya diberikan jawabannya, tetapi juga diberikan dalilnya sehingga anak akan merasa puas atas jawaban yang telah diberikan. Jika ada anak yang pertanyaan sedikit filsafat atau

sedikit di luar nalar maka tetap harus didampingi dengan jawaban fiqih serta memberikan gambaran. Terkadang para ABH memberikan pertanyaan di luar nalar dan pembahasan, tetapi jangan takut, tetaplah memberikan jawaban logis dan sertakan dengan dalilnya jika ada. Para ABH memang suka menguji orang yang memberikan bimbingan dan pembelajaran kepada mereka. Jika terdapat pertanyaan yang menyesatkan maka harus tegas agar anak itu menjadi sangat mengerti.

Menurut Bapak Jubaedi, ketika para ABH mempunyai masalah harus ditinjau terlebih dahulu kenapa anak itu melakukan kesalahan dan ditinjau latar belakangnya kenapa dia melakukan seperti itu. Jangan selalu melihat sisi buruk anak, akan tetapi tetap harus melihat sisi baiknya. Selain itu jangan seolah-olah menyalahkan para ABH sampai anak merasa tertekan, tetapi beri pemahaman kepada anak agar mengerti kesalahannya dan apa yang harus anak perbaiki. Jadi dalam mengatasi dan menghadapi para ABH terutama pelaku, harus sangat sabar dan tetap harus tegas. Selain itu ajarkan para ABH untuk ikhlas dengan apa yang telah terjadi, hal tersebut merupakan bentuk ujian dari Allah SWT, dan ketika ikhlas dan memiliki kesadaran untuk memperbaiki maka akan membuat semuanya menjadi lebih baik.

Sebagai guru bimbingan mental spiritual dan pengasuh para ABH hukumnya wajib bekerja sama dengan pekerja sosial karena pekerja sosial sebagai pengawas, pengurus administrasi mengenai berbagai urusan para ABH. Pekerja sosial juga sebagai perantara dengan keluarga anak yang bersangkutan untuk tetap selalu bisa berkomunikasi. Guru bimbingan mental agama juga perlu tau informasi yang ada dari pekerja sosial mengenai data penerima manfaat, seperti surat atau hasil dari kejaksaan, penyidik, dan lain sebagainya. Informasi tersebut berguna bagi guru bimbingan mental spiritual untuk memberikan bimbingan dan

pengarahan yang sesuai dengan kasus penerima manfaat. Guru bimbingan mental spiritual juga memberikan *feedback* kepada pekerja sosial dengan memberikan hasil data anak selama proses bimbingan mental spiritual dan keseharian anak karena informasi-informasi tersebut lebih banyak diketahui oleh para pengasuh dan guru bimbingan mental spiritual.

Peran Guru bimbingan mental spiritual sangat penting karena ilmu agama merupakan pondasi utama bagi anak dalam berperilaku. Namun, dalam mengajak kebaikan tidak harus guru bimbingan mental spiritual saja yang mengingatkan, tetapi pekerja sosial atau pengasuh atau yang lainnya juga perlu mengingatkan, contohnya seperti bertanya kepada anak apakah udah sholat. Pekerja sosial, pengasuh, bimbingan mental spiritual harus bekerja sama dalam melihat dan mengamati anak agar dapat mengetahui perkembangannya sudah sejauh mana. Jadi dalam melakukan bimbingan mental dan spiritual melibatkan banyak pihak. Para ABH juga harus sering diajak untuk refleksi diri agar mereka sadar dan bertaubat.

Tantangan utama yang dihadapi oleh guru bimbingan mental spiritual biasanya terkait memberikan pengertian dan pengarahan kepada para ABH, akan tetapi anak tetap mengulangi kesalahannya. Sebagai guru bimbingan mental spiritual tetap harus meyakinkan dan menyadari anak agar mampu berubah menjadi lebih baik. Dalam hal tersebut dibutuhkan kesabaran selama prosesnya berlangsung. Tantangan selanjutnya adalah memastikan penempatan para penerima manfaat yakni ABH harus memiliki asrama yang mendorong anak untuk menjadi lebih baik. Maka dari itu, selama proses rehabilitasi sosial berlangsung terutama dalam proses intervensi, peran pengasuh sangatlah penting karena pengasuh yang memiliki waktu lebih banyak dengan para penerima manfaat. Pengasuh juga harus memiliki ilmu-ilmu agama dan memberikannya ke

anak asuhnya. Pengasuh juga harus berusaha untuk mendidik dan mendisiplinkan anak agar anak menjadi lebih baik.

Program yang efektif bagi guru bimbingan mental spiritual ialah memberikan ceramah dengan metode berdiskusi. Penerima manfaat yakni para ABH akan diperbolehkan untuk mengutarakan perasaan, pemikiran, dan pertanyaan. Jika terdapat kesalahan mengenai yang disampaikan oleh penerima manfaat, maka peran guru mental spiritual dilakukan dengan meluruskan perspektif penerima manfaat agar tidak terjadi kekeliruan yang menimbulkan kesesatan. Dalam meluruskan perspektif, Bapak Jubaedi seringkali menyelipkan ajaran hukum fiqih. Para ABH tersebut diajarkan membaca kitab suci, bacaan doa, bacaan sholat, dan hafalan. Dalam proses penerapan program ini pengajarannya tidak disamaratakan, melainkan dilakukan peninjauan dari berbagai sisi seperti kesiapan dari mental si anak, latar belakang, dan karakter anak. Ketika proses berbicara dengan para ABH harus tegas perihal ketika anak bertutur kata maupun berperilaku tidak baik. Setiap hal tercela yang dilakukan oleh para ABH harus dijelaskan konsekuensinya sebelumnya oleh guru bimbingan mental spiritual, maka ketika para ABH melanggar aturan konsekuensi tersebut akan diterapkan. Dalam hal ini diharapkan memberikan efek jera. Dalam memberikan konsekuensi harus disertai dengan pemberian nasehat dan pemahaman agar penerima manfaat sadar dan tidak mengedepankan emosi. Etika dan akhlak adalah hal yang utama untuk berkelakuan sehari-hari. Akhlak juga berlaku untuk semua orang tidak hanya anak ke orang dewasa tetapi orang dewasa juga ke anak. Sehingga dalam memberikan pengajaran, guru bimbingan mental spiritual juga memberikan contoh akhlak yang baik.

Menurut Bapak Jubaedi, dalam segala sesuatu, adab memiliki kedudukan di atas ilmu. Orang beradab biasanya sudah memiliki ilmu karena jika orang itu beradab, maka ilmu yang disampaikan oleh guru atau orang-orang sekitarnya akan membawa keberkahan. Ketika bekerja dengan orang lain maka harus memiliki adab. Hal yang paling penting dalam keterampilan sebagai seorang manusia adalah akhlak dengan bermuamalah. Penilaian orang paling pertama adalah dilihat dari perilaku atau adab kita terhadap dengan orang itu.

Untuk memantau hasil proses intervensi para ABH dapat dilihat langsung oleh pengasuh keseharian yang dilakukan anak. Apakah anak melakukan tugasnya dengan baik dan benar. Apakah anak mendengarkan dan patuh dengan pengasuh, apakah anak rajin mengikuti keterampilan, apakah selalu sholat di masjid, dan apakah masih sering membuat masalah atau tidak.

Selama proses intervensi dijalankannya di Sentra Handayani Jakarta juga menerapkan program reintegrasi dan rehabilitasi, program-program ini dirancang khusus untuk membantu anak-anak yang telah berhadapan dengan hukum untuk kembali beradaptasi dan berintegrasi ke dalam masyarakat. Program ini dapat meliputi pelatihan keterampilan sosial, pendidikan, atau pelatihan kerja untuk membantu anak-anak membangun fondasi yang kuat untuk masa depan mereka. Program reintegrasi dan rehabilitasi juga dapat menyediakan dukungan emosional, pembinaan, dan pengawasan untuk membantu anak-anak menghindari perilaku kriminal atau keterlibatan ulang dalam masalah hukum. Peran keluarga sangat penting dalam mendukung kesehatan mental dan reintegrasi anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Keluarga dapat memberikan dukungan emosional, membantu dalam proses rehabilitasi, dan memfasilitasi akses anak-anak ke sumber

daya dan layanan yang diperlukan. Program-program pendukung keluarga dapat membantu mengembangkan keterampilan *parenting* yang efektif, memperbaiki hubungan keluarga, dan memberikan dukungan praktis dan finansial bagi keluarga yang membutuhkan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dalam menjalankan proses intervensi di Sentra Handayani Jakarta melibatkan peran dari berbagai profesi. Peran pekerja sosial mencakup keseluruhan aspek penerima manfaat mulai dari administrasi, keluarga, dan penerima manfaat itu sendiri. Selanjutnya psikolog yang menangani penerima manfaat dalam aspek psikologis penerima manfaat. Sedangkan Guru bimbingan mental spiritual dan pengasuh memiliki peran dalam bidang akhlak dan spiritual penerima manfaat.

Peran pekerja sosial dalam menghadapi anak berhadapan dengan hukum (ABH) memiliki dampak yang signifikan dalam proses intervensi dan rehabilitasi mereka. Pekerja sosial bertindak sebagai mediator yang memastikan hak-hak anak dihormati dan menjaga proses hukum yang adil tanpa adanya intimidasi dari pihak lain. Selain itu, kerjasama dengan berbagai pihak terkait menjadi penting dalam menciptakan situasi yang kondusif dan mendukung pemulihan anak setelah masa rehabilitasi. Meskipun dihadapkan pada tantangan yang kompleks, pekerja sosial dapat meminta bantuan dari pekerja sosial Madya atau lembaga terkait lainnya untuk mengatasi hambatan yang mungkin muncul. Di sisi lain, penanganan masalah kesehatan mental ABH menjadi perhatian utama bagi psikolog.

Dalam proses intervensi, psikolog memainkan peran penting dalam menangani beragam masalah seperti trauma, emosi yang tidak stabil, dan perilaku negatif yang mungkin dialami oleh anak berhadapan dengan hukum. Dengan pendekatan yang sesuai dan

melibatkan anak dalam pengambilan keputusan intervensi, psikolog dapat memberikan dukungan yang efektif dan berkelanjutan. Sentra Handayani di Jakarta telah mengimplementasikan pendekatan rehabilitasi sosial yang melibatkan peran guru agama dan bimbingan mental spiritual, mengakui bahwa aspek sosial dan spiritual juga memiliki peran penting dalam memperbaiki kualitas hidup para ABH.

Bimbingan mental dan spiritual menjadi aspek yang tidak dapat diabaikan dalam upaya membantu anak berhadapan dengan hukum. Guru bimbingan mental spiritual memiliki peran krusial dalam memberikan dukungan spiritual dan moral kepada anak-anak ini. Melalui pengajaran agama, contoh akhlak yang baik, dan menjawab pertanyaan dengan dalil, guru bimbingan mental spiritual membantu ABH menemukan makna hidup, menguatkan nilai-nilai etika dan moral, serta mengelola trauma dan emosi yang kuat. Peran keluarga dan bimbingan mental spiritual dalam implikasi penelitian ini menekankan pentingnya peran keluarga dan bimbingan mental spiritual dalam membantu anak-anak berhadapan dengan hukum. Keluarga memiliki peran yang signifikan dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi anak ke dalam masyarakat. Selain itu, bimbingan mental spiritual juga diperlukan untuk membantu anak-anak menemukan makna dan tujuan hidup, menguatkan nilai-nilai etika dan moral, serta mendukung proses pemulihan mereka. Guru bimbingan mental spiritual perlu bekerja sama dengan pekerja sosial dan keluarga dalam memberikan dukungan yang komprehensif.

Dalam keseluruhan, kerjasama antara pekerja sosial, psikolog, dan guru bimbingan mental spiritual menjadi pondasi yang kuat dalam memberikan intervensi yang holistik dan mendukung pemulihan anak berhadapan dengan hukum. Dengan peran masing-masing yang tegas dan komplementer, serta

melibatkan keluarga dan pihak terkait lainnya, diharapkan anak-anak ini dapat mendapatkan perlindungan, pemulihan, dan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Selain itu, bimbingan mental spiritual juga diperlukan untuk membantu anak-anak menemukan makna dan tujuan hidup, menguatkan nilai-nilai etika dan moral, serta mendukung proses pemulihan mereka. Guru bimbingan mental spiritual perlu bekerja sama dengan pekerja sosial dan keluarga dalam memberikan dukungan yang komprehensif.

Tantangan dan solusi dalam penelitian ini ialah mengidentifikasi beberapa tantangan yang dihadapi dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum, seperti terhambatnya proses hukum, pembentukan karakter sebelumnya, dan jumlah penerima manfaat yang banyak. Implikasi penelitian ini menyarankan perlunya solusi yang sesuai, seperti mengutamakan anak-anak yang membutuhkan intervensi paling mendesak, meminta bantuan dari pekerja sosial madya atau lembaga terkait lainnya, dan menciptakan situasi kondusif serta kerjasama dengan pekerja sosial dan keluarga.

Saran

Untuk peneliti sebelumnya dapat mengeksplorasi faktor-faktor risiko dan protektif yang berhubungan dengan anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Faktor-faktor ini dapat meliputi latar belakang keluarga, pengalaman masa kecil, pendidikan, dan lingkungan sosial. Memahami faktor-faktor ini dapat membantu dalam pengembangan strategi intervensi yang lebih efektif. Selain itu juga perlu dilakukan penelitian evaluatif untuk menganalisis efektivitas program rehabilitasi sosial seperti yang dilakukan di Sentra Handayani di Jakarta. Penelitian ini

dapat melibatkan pengumpulan data sebelum dan setelah program, serta penggunaan kelompok kontrol untuk membandingkan hasil dengan kelompok yang tidak mendapatkan intervensi.

Untuk peneliti selanjutnya juga dapat mengembangkan model intervensi yang holistik untuk anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Model ini harus mencakup aspek psikologis, sosial, dan spiritual, serta melibatkan berbagai stakeholder seperti pekerja sosial, psikolog, guru bimbingan mental spiritual, keluarga, dan lembaga terkait lainnya. Model ini harus mempertimbangkan kebutuhan individu anak dan menerapkan pendekatan yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristik dan masalah yang dihadapi oleh anak-anak tersebut. Perlu juga untuk melakukan penelitian terkait dua lembaga rehabilitasi sosial atau lebih terkait proses intervensi yang dijalankan tujuannya untuk membandingkan proses intervensi yang berlangsung. Selain itu penting juga untuk menggali lebih lanjut mengenai praktik kolaboratif antara pekerja sosial, psikolog, dan guru bimbingan mental spiritual. Penelitian dapat mengevaluasi keefektifan kolaborasi ini, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kerja sama yang sukses, dan mengembangkan model kerja sama yang terintegrasi untuk memberikan intervensi yang komprehensif bagi anak-anak berhadapan dengan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Bambang Syamsul. (2015). *Psikologi Sosial. (Cet.1)*. Bandung: Pustaka Setia.
- Hardani, dkk. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group.
- Handayani, R., & Purnama, C. (2018). Model Intervensi Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum di Sentra Handayani Jakarta. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 13(1), 55-73.
- Hoefer, R. (2012). *Advocacy Practice for Social Justice* (2nd ed.). Chicago: Lyceum.
- Herlina. (2013). *Mengatasi Masalah Anak dan Remaja*. Bandung: Pustaka Cendekia Utama.
- Kanel, K. (2012). *A Guide to Crisis Intervention* (5th ed.). Belmont, CA: Brooks/Cole Cengage Learning.
- Laporan Negara RI. (2017). *Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Pekerja Sosial*. Kementerian Sosial Republik Indonesia. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Laporan Negara RI. (2012). *Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)*. Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Laporan Negara RI. (2014). *Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Laporan Negara RI. (2018). *Peraturan Menteri Sosial Nomor 17 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Anak di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial*. Kementerian Sosial Negara Republik Indonesia.
- Lembaran Negara RI. (2019). *Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial*. Kementerian Sosial Republik Indonesia.
- Laporan Negara RI. (2021). *Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI)*. Kementerian Sosial Republik Indonesia.
- Martin, G. & Pear, J. (2019). *Behavior Modification* (11th ed.). New York: Routledge.

- Meitasari, A., & Kurniawan, B. (2021). *Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Dinas Sosial Kabupaten Lamongan*. *Publika*, 9(5), 59-74.
- Nursanti, D. (2016). *Proses Intervensi Pekerja Sosial dalam Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum di Sentra Handayani Jakarta*. *Jurnal Permasayarakatan*, 9(2), 139-154.
- Payne, Malcolm. (2016). *Teori Pekerjaan Sosial Modern*, ed. ke-4. Terjemahan: Susiladiharti & Admiral Nelson. Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru.
- Pahlevi, R. (2022, July 29). *Jumlah Anak yang Berhadapan dengan Hukum sebagai Pelaku Kekerasan Fisik dan Psikis (2016-2020)*. <https://Databoks.Katadata.Co.Id/Datapublish/2022/07/29/Ini-Jumlah-Anak-Anak-Yang-Jadi-Pelaku-Kekerasan-Di-Indonesia> diakses pada tanggal 17 Juni 2023.
- Prasetyo, A. (2020). *Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana*. *Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1).
- Pribadi, D. (2018). *Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum*. *Jurnal Hukum Volkgeist*, 3(1).
- Purba, J. A. (2017). *Tinjauan Proses Intervensi dalam Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum di Sentra Handayani Jakarta*. *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 2(1), 17-30.
- Raviyoga, T.T. & Marheni, A. (2019). *Hubungan Kematangan Emosi dan Konformitas Teman Sebaya terhadap Agresivitas Remaja di SMAN 3 Denpasar*. *Jurnal Psikologi Udayana* 6(1) 44-45.
- Rivaldi, M., Kusmawati, A., & Tohari, M. A. (2020). *Intervensi Sosial Melalui Terapi Psikoreligius pada Remaja Penyalahgunaan Narkoba*. *Journal of Social Work and Social Service*, 1(2).
- Rizaty, M. A. (2022). *KPAI Catat 4.124 Kasus Perlindungan Anak hingga November 2022*. <https://DataIndonesia.Id/Ragam/Detail/Kpai-Catat-4124-Kasus-Perlindungan-Anak-Hingga-November-2022> diakses pada tanggal 17 Juni 2023.
- Loewenberg, Frank M.. (2008). *Dasar - Dasar Intervensi Sosial: Konsep Inti dan Keterampilan untuk Praktik Pekerjaan Sosial*. Terjemahan: Etty Sumiaty. Bandung: Yapas.